

Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Inklusi Keuangan dan Perkembangan UMKM di Indonesia

Sri Rahayu Wahyuni¹ Maria Ulfa² Juwita maisyarah³ Joni Hendra K4

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: sr1401040@gmail.com¹ mariaulfaglr@gmail.com² juwitamaisyarah05@gmail.com³ joniqizel77@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak Financial Technology (Fintech) terhadap inklusi keuangan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan semakin pesatnya perkembangan fintech, tercatat lebih dari 300 perusahaan fintech aktif pada tahun 2023, yang berperan penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Fintech memberikan solusi inovatif dalam mengatasi berbagai kendala akses perbankan tradisional, memungkinkan UMKM mengakses permodalan dengan lebih fleksibel, serta mendukung peningkatan literasi keuangan melalui fitur edukasi digital. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks inklusi keuangan dan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setelah adopsi fintech. Meskipun demikian, tantangan berupa infrastruktur digital, literasi teknologi, dan biaya adopsi masih menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peluang dan tantangan fintech sebagai pendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Financial Technology, Inklusi Keuangan, UMKM, Pembiayaan Digital, Indonesia, Pemberdayaan Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era digital yang berkembang pesat, Financial Technology (Fintech) telah menjadi transformasi penting dalam ekosistem keuangan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi mencapai 278,69 juta jiwa (BPS, 2023) dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia menyajikan potensi besar bagi perkembangan fintech dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Putri dkk., 2023). Kehadiran fintech menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem keuangan konvensional, seperti akses terbatas ke layanan perbankan, proses yang rumit, dan biaya transaksi yang tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 300 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, menawarkan berbagai layanan mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga manajemen keuangan digital. Perkembangan ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan tradisional (Muhammad Fachri, 2024). UMKM, yang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menyumbang sekitar 61% dari PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, menjadi salah satu sektor yang mendapatkan manfaat signifikan dari perkembangan fintech (KKBPRI, 2021). Dengan mewakili 99% dari total unit usaha di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan fintech dan potensi manfaatnya, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak nyata teknologi ini terhadap inklusi keuangan dan perkembangan UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam prosesnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), dimana pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan (Abdussamad, H. Z., 2021). Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta publikasi dari lembaga penelitian terkemuka. Data yang dikumpulkan difokuskan pada periode 2014-2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi mengenai perkembangan fintech dan dampaknya terhadap inklusi keuangan serta UMKM di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, mengorganisir literatur berdasarkan tema-tema spesifik seperti perkembangan fintech, inklusi keuangan, dan UMKM; kedua, melakukan sintesis terhadap temuan-temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel; dan ketiga, menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai dampak fintech terhadap inklusi keuangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti berdasarkan bukti empiris dari berbagai sumber terpercaya (sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fintech di Indonesia

Financial Technology atau Fintech merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menghadirkan proses bisnis lebih efisien dan mudah diakses (Jamal dkk., 2023). Berdasarkan definisi dari Bank Indonesia, Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Secara umum, Fintech di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori utama: pembayaran digital (payment), peminjaman (lending), investasi (investment), asuransi (insurance), dan manajemen keuangan (financial management). Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung transformasi digital sektor keuangan. Perkembangan industri Fintech di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif selama periode 2019-2024. Berdasarkan data OJK, jumlah perusahaan Fintech berizin dan terdaftar mengalami peningkatan signifikan dari 164 perusahaan pada tahun 2019 menjadi lebih dari 300 perusahaan pada tahun 2023 (OJK, 2024). Volume transaksi digital juga menunjukkan pertumbuhan eksponensial, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi layanan keuangan digital. Khusus untuk sektor pembayaran digital, Bank Indonesia mencatat peningkatan nilai transaksi dari Rp 145 triliun pada 2019 menjadi lebih dari Rp 300 triliun pada 2023 (Nyoman Adhiarna, 2023).

Dalam aspek regulasi, pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatur industri Fintech. OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Bank Indonesia juga menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem Fintech yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Meskipun pertumbuhannya pesat, industri Fintech di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan. Masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya kasus penipuan digital. Kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan

juga masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses layanan Fintech. Namun, peluang pengembangan Fintech tetap terbuka luas, didukung oleh populasi yang besar, penetrasi smartphone yang tinggi, dan masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani perbankan tradisional. Potensi pasar yang besar ini, ditambah dengan dukungan regulasi yang semakin matang, memberikan optimisme bagi pertumbuhan berkelanjutan industri Fintech di Indonesia.

Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan (Ferdi dkk., 2022). Bank Indonesia dan OJK mendefinisikan inklusi keuangan melalui beberapa indikator utama, meliputi akses terhadap layanan keuangan formal, frekuensi penggunaan produk keuangan, kualitas produk dan layanan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara berkelanjutan. Sebelum era Fintech, kondisi inklusi keuangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Berdasarkan survei OJK tahun 2016, indeks inklusi keuangan Indonesia hanya mencapai 67,8%. Kendala utama meliputi persyaratan administratif yang rumit, jangkauan layanan perbankan yang terbatas di daerah terpencil, serta minimnya literasi keuangan masyarakat (Hasan & Saifunnajar, 2021). Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses layanan keuangan. Masyarakat di daerah rural dan remote seringkali kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional karena keterbatasan infrastruktur dan jaringan kantor cabang bank. Kehadiran Fintech telah memberikan dimensi baru dalam upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui inovasi teknologi, Fintech mampu menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan dengan menawarkan solusi yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Dompot digital, misalnya, memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan hanya melalui smartphone. Layanan pinjaman online (peer-to-peer lending) juga membuka akses permodalan bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan kredit dari perbankan tradisional. Data OJK menunjukkan bahwa sejak hadirnya Fintech, indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat signifikan mencapai 85,1% pada tahun 2022 (Indra Arief Pribadi, 2022). Dampak layanan Fintech terhadap akses keuangan masyarakat terlihat dari beberapa aspek. Pertama, penurunan biaya transaksi keuangan karena proses yang lebih efisien dan minimnya kebutuhan infrastruktur fisik. Kedua, peningkatan penetrasi layanan keuangan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Ketiga, demokratisasi akses keuangan dimana masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati layanan keuangan tanpa diskriminasi. Bank Indonesia mencatat volume transaksi digital yang terus meningkat, menunjukkan adopsi yang semakin luas oleh masyarakat. Selain itu, layanan Fintech juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai fitur edukasi dan kemudahan akses informasi keuangan (Budyastuti, t.t.)

Perkembangan UMKM Di Era Digital

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61% dari total PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Secara struktural, UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha mikro (98,68%), diikuti usaha kecil (1,22%), dan usaha menengah (0,10%). Mayoritas UMKM

bergerak di sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Karakteristik utama UMKM Indonesia meliputi manajemen bisnis yang masih tradisional, keterbatasan penggunaan teknologi, dan dominasi usaha keluarga (KKBPRI, 2021). Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah akses terhadap permodalan. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 69,5% UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan agunan, pencatatan keuangan yang belum terstandar, serta profil risiko yang dianggap tinggi oleh perbankan konvensional. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM tentang produk-produk keuangan dan prosedur pengajuan kredit yang kompleks (Maria Elana, 2021). Digitalisasi UMKM melalui platform Fintech membuka peluang baru dalam mengatasi berbagai kendala tradisional. Platform e-commerce yang terintegrasi dengan layanan pembayaran digital memungkinkan UMKM memperluas jangkauan pasar mereka. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar 19 juta UMKM telah bergabung dengan platform digital (Musliyana dkk., 2024). Platform Fintech lending juga menawarkan alternatif pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan proses yang lebih cepat dibandingkan perbankan konvensional. Berbagai platform manajemen bisnis digital membantu UMKM dalam pencatatan keuangan, pengelolaan inventori, dan pelaporan pajak.

Analisis Dampak Fintech Terhadap UMKM

Fintech telah memberikan dampak transformatif terhadap akses permodalan UMKM melalui berbagai inovasi layanan keuangan digital. Platform peer-to-peer lending dan crowdfunding menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan sistem perbankan konvensional. Data OJK menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, penyaluran pinjaman melalui platform Fintech kepada UMKM mencapai lebih dari Rp 50 triliun dengan tingkat persetujuan yang lebih tinggi dibandingkan kredit bank konvensional. Proses pengajuan pinjaman yang lebih sederhana, tanpa kebutuhan agunan fisik, dan pencairan yang lebih cepat menjadi keunggulan utama layanan Fintech dalam mendukung kebutuhan modal UMKM (Antara & Bayu Saputra, 2024). Perluasan pasar melalui platform digital menjadi salah satu dampak paling signifikan dari adopsi Fintech bagi UMKM. Integrasi e-commerce dengan sistem pembayaran digital telah membuka akses ke pasar yang lebih luas, melampaui batasan geografis tradisional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM yang bergabung dengan platform digital mengalami peningkatan omzet rata-rata sebesar 26% pada tahun 2023. Kemudahan transaksi melalui berbagai metode pembayaran digital (e-wallet, QRIS, transfer bank instan) juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong volume transaksi. Fintech juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM. Melalui berbagai fitur edukasi yang terintegrasi dalam aplikasi Fintech, pelaku UMKM mendapatkan pemahaman lebih baik tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan perencanaan bisnis. Program pelatihan digital yang diselenggarakan oleh platform Fintech, bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta, telah menjangkau lebih dari 5 juta pelaku UMKM sejak tahun 2020. Peningkatan literasi keuangan ini berdampak positif pada kemampuan UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan perencanaan ekspansi usaha.

Tantangan Implementasi Fintech di UMKM

Implementasi Fintech di sektor UMKM menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari aspek infrastruktur, kesenjangan digital masih

menjadi tantangan utama, terutama di daerah rural dan remote. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, sekitar 35% wilayah Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil, yang menjadi prasyarat utama dalam penggunaan layanan Fintech. Kondisi ini menciptakan disparitas dalam adopsi teknologi finansial antara UMKM di perkotaan dan pedesaan (Nurfadilah, t.t.). Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan kesiapan digital pelaku UMKM. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital dan memahami fitur-fitur Fintech yang tersedia. Resistensi terhadap perubahan dan keengganan meninggalkan metode tradisional juga menjadi hambatan signifikan, terutama di kalangan pelaku UMKM senior. Keterbatasan pemahaman tentang keamanan siber dan risiko digital membuat banyak pelaku UMKM ragu untuk mengadopsi solusi Fintech secara penuh (Marsally dkk., t.t.). Dari sisi regulasi dan kepatuhan, kompleksitas persyaratan dan prosedur kepatuhan seringkali menjadi beban bagi UMKM. Meskipun regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik ilegal, namun proses verifikasi yang ketat dan dokumentasi yang diperlukan kadang memberatkan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Data OJK menunjukkan bahwa sekitar 45% aplikasi UMKM untuk layanan Fintech ditolak karena ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan regulasi. Kendala biaya juga tidak dapat diabaikan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Meskipun dalam jangka panjang digitalisasi dapat menghemat biaya operasional, investasi awal untuk infrastruktur digital, pelatihan karyawan, dan biaya langganan layanan Fintech seringkali memberatkan UMKM dengan modal terbatas. Beberapa platform Fintech mengenakan biaya transaksi dan komisi yang cukup signifikan, yang dapat mempengaruhi margin keuntungan UMKM yang sudah tipis.

KESIMPULAN

Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap inklusi keuangan dan perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan signifikan jumlah perusahaan Fintech dari 164 (2019) menjadi lebih dari 300 perusahaan (2023), yang diikuti dengan peningkatan volume transaksi digital dari Rp 145 triliun menjadi lebih dari Rp 300 triliun pada periode yang sama. Dampak positif ini juga tercermin dalam peningkatan indeks inklusi keuangan dari 67,8% (2016) menjadi 85,1% (2022), serta bergabungnya sekitar 19 juta UMKM ke platform digital hingga 2023. Kehadiran Fintech telah berhasil mengatasi berbagai kendala tradisional seperti akses geografis dan administratif, dengan penyaluran pinjaman kepada UMKM mencapai lebih dari Rp 50 triliun dan peningkatan omzet rata-rata sebesar 26% bagi UMKM yang mengadopsi platform digital. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan literasi teknologi, perkembangan Fintech telah terbukti menjadi katalis penting dalam transformasi ekosistem keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Antara & Bayu Saputra. (2024). OJK: Outstanding pembiayaan pinjol capai Rp59,64 triliun pada 2023. antaranews.
- Budyastuti, T. (t.t.). Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha.
- Ferdi, M., Amri, M., & Zaenal, M. (2022). Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Aplikasi Panel Data.

- Hasan, Z., & Saifunnajar, S. (2021). The Impact of Gross Enrollment Ratio (GER) of Tertiary Education in Indonesia on the Literacy and Inclusion Index: A Case Study Of Islamic Finance in Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 13(2), 203.
- Indra Arief Pribadi. (2022). OJK: Inklusi keuangan Indonesia meningkat, jadi 85,10 persen tahun ini. ANTARA 2022.
- Jamal, A., Mangkona, S., & Wahyudin, W. (2023). Transformasi Industri Keuangan melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan Peluang. *Movere Journal*, 5(02), 297–304. <https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>
- KKBPRI. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Maria Elana. (2021). BI Ungkap 69,5 Persen UMKM Belum Dapat Akses Kredit Perbankan. finansial.bisnis.com.
- Marsally, S. V., Nugroho, H. F., Saputri, S. E., Tavania, R., & Saputro, R. F. (t.t.). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada UMKM di Kabupaten Banyumas.
- Muhammad Fachri. (2024). Fintech di Indonesia, Meninjau Konsep, Perkembangan, dan Tantangan di Era Digital. kompasiana.com.
- Musliyana, Najma Khairani, RidhoArdiansyah, & Rony Edward Utama. (2024).
- Nurfadilah, D. (t.t.). Implementasi Sistem Pembayaran Digital Pada UMKM Rumah Sinok Mille Crapes Karawang.
- Nyoman Adhiarna. (2023). Buku data statistika aplikasi informatika tahun 2023. Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- OJK. (2024). Financial Technology—P2P Lending.
- Putri, M. P. L., Alamsyah, A. N. F., Prameswari, D. A., Anam, K., Regisca, L. I., & Ishmah, A. N. (2023). Sabana App: Platform Digital Pengolahan Biofuel Based On Community Di Pulau Pramuka.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&A. Alfabeta.